

ABSTRAK

Permasalahan dalam merger yang terjadi di bank adalah adanya risiko terjadinya wanprestasi terhadap nasabah penyimpan dana deposito berjangka. Permasalahan yang terjadi pada saat merger adalah ketika nasabah tidak dapat mencirkan depositonya setelah terjadinya merger. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap nasabah deposito berjangka pada bank yang mengalami merger dan mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan No 72/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Perlindungan hukum nasabah deposito berjangka pada bank yang mengalami merger sudah dilakukan melalui mekanisme perlindungan Terhadap Nasabah menurut Pasal 29 ayat 2-4, Pasal 49 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 4, 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan juga diatur menurut Pasal 10 dan Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (UU LPS) serta dikuatkan dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 PBI No. 3/10/PBI/2001 Mengenai Prinsip *Know Your Customer Principles*. Akibat hukum terhadap nasabah deposito berjangka pada bank yang mengalami merger adalah ketika terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan merger, yang dalam hal mempunyai kedudukan sebagai debitur, maka hutangnya kepada debitur dapat menjadi hutang tanpa dukungan aset yang merupakan jaminan pelunasan hutang.

Kata Kunci : merger, bank, nasabah penyimpan dana

ABSTRACT

The problem in the merger that occurs in banks is the risk of default on depositors. The problem that occurs at the time of the merger is when the customer cannot deposit the deposit after the merger. This study aims to determine the legal consequences of time deposit customers at banks that have experienced mergers and review the Judges' consideration in deciding Decision No. 72 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Sel.

This research uses a normative juridical approach, which is an approach to analyze the law as a set of normative laws and regulations. The specification of this study is analytical descriptive, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of law implementation concerning these issues.

Legal protection for customers of time deposits in banks undergoing merger has been done through the mechanism of protection of customers according to Article 29 paragraphs 2-4, Article 49 and Article 52 of Act Number 10 of 1998 concerning Banking, Articles 4, 45 and 46 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Protection is also regulated according to Article 10 and Article 37B paragraph (2) of Law Number 7 of 2009 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 3 of 2008 concerning Amendment to Law Number 24 of 2004 concerning Deposit Insurance Corporation into Law (LPS Law) and strengthened by Article 2 paragraph 1 and 2 PBI No. 3/10 / PBI / 2001 Regarding Know Your Customer Principles. The legal consequence of a time deposit customer at a merged bank is when there is a transfer of assets of the company that merged, which in the case of having a position as a debtor, the debt to the debtor can become a debt without the support of assets which are guarantees of debt repayment.

Keywords: mergers, banks, depositors